RENCANA AKSI TINDAK LANJUT
HASIL SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024
HASIL INDEKS TOTAL= 70.14
INDEKS DIMENSI KARAKTER= 76,9, INDEKS DIMENSI EKOSISTEM= 72,15, INDEKS DIMENSI TATA KELOLA = 61.05

No	REKOMENDASI	TEMUAN YANG DITINDAKLANJUTI		RENCANA AKSI				PENANGGUNG JAWAB
		DIMENSI	ASPEK TEMUAN	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	
1	**Pengembangan Program Pembiasaan Karakter** Satuan pendidikan perlu mengembangkan program yang secara aktif membiasakan nilai-nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari peserta didik. Kegiatan ini dapat mencakup pelatihan tentang keterampilan sosial dan emosional. Misalnya, kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada pengembangan karakter, seperti seminar tentang etika, pelatihan kepemimpinan, dan proyek sosial. Melalui kegiatan ini, peserta didik akan belajar tentang pentingnya kejujuran dan tanggung jawab dalam konteks kehidupan sehari-hari. Misalnya, mengadakan kompetisi di mana peserta didik harus menyelesaikan masalah sosial dengan pendekatan							

	yang etis sehingga dapat menerapkan nilai-nilai tersebut secara langsung							
2	**Evaluasi Berkala untuk Memantau Perkembangan Karakter** Sistem evaluasi yang komprehensif perlu dikembangkan untuk memantau kemajuan pendidikan secara holistik. Ini termasuk penilaian akhir semester maupun tahunan yang tidak hanya fokus pada prestasi akademis tapi juga perilaku sosial dan karakter individu. Penilaian ini dilaksanakan dengan objektif dan profesional. Hasil evaluasi ini nanti dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk merancang strategi perbaikan yang tepat. Misalnya, jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa banyak peserta didik masih belum memiliki perilaku integritas yang konsisten, maka strategi perbaikan dapat difokuskan pada pelatihan tambahan tentang etika dan moral.							
3	**Pengembangan Kolaborasi antara Tenaga Pendidik, Pimpinan, dan Wali Peserta Didik** Untuk memperbaiki ekosistem satuan							

	pendidikan, diperlukan kolaborasi yang fokus pada penguatan dasar-dasar komunikasi dan kepercayaan antar pemangku kepentingan. Pendekatan ini penting untuk menciptakan fondasi yang stabil, sehingga setiap pihak dapat mulai memberikan kontribusi positif. Langkah awal yang dapat dilakukan adalah mengadakan forum komunikasi sederhana namun rutin untuk membangun hubungan dan meningkatkan kepercayaan antara tenaga pendidik, pimpinan satuan pendidikan, dan wali peserta didik. Forum ini bisa berfokus pada isu-isu mendasar, seperti pemahaman bersama tentang kebutuhan peserta didik, pengelolaan tantangan belajar, dan upaya memperbaiki kondisi belajar-mengajar. Selain itu, pemberian dukungan langsung, seperti pelatihan sederhana untuk tenaga pendidik atau pembekalan orang tua tentang peran mereka dalam mendukung pendidikan anak, juga dapat menjadi bagian penting. Dengan pendekatan ini, ekosistem dapat mulai membangun kepercayaan dan stabilitas yang diperlukan untuk menuju tingkat yang							

	lebih baik.							
4	**Mengembangkan Transparansi dalam Tata Kelola Pendidikan** Satuan pendidikan perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk memperbaiki kondisi tata kelola yang ada. Satuan pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap praktik tata kelola saat ini dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk tenaga pendidik, wali peserta didik dan pimpinan. Penting untuk membangun kesadaran akan pentingnya integritas tata kelola pendidikan melalui pelatihan dan sosialisasi yang rutin. Satuan pendidikan perlu mengembangkan sistem pengawasan yang lebih ketat untuk meminimalisir risiko tindakan tidak berintegritas, termasuk penerapan mekanisme pelaporan yang transparan bagi semua pihak. Transparansi ini dapat dicapai dengan membuat laporan keuangan satuan pendidikan tersedia publik, melakukan audit reguler atas sumber daya yang digunakan, serta memastikan bahwa semua informasi tentang proyek-proyek pendidikan							

	dan anggaran dibuka kepada umum. Melibatkan para stakeholder dalam pengambilan keputusan juga dapat meningkatkan rasa aman dan percaya diri terhadap sistem pendidikan. Misalnya, menciptakan platform online yang memudahkan aksesibilitas data satuan pendidikan bagi siapa pun yang ingin melihatnya. Platform ini dapat berupa situs web resmi satuan pendidikan yang menyediakan informasi lengkap tentang kurikulum, anggaran, dan hasil evaluasi akademik. Dengan adanya transparansi ini, maka kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan karena semakin banyak yang memantau aktivitas operasional satuan pendidikan. Selain itu, penting untuk meningkatkan implementasi program pelatihan bagi staf dan tenaga pendidik mengenai praktik tata kelola yang baik dan etika, sehingga mereka dapat lebih siap dalam menghadapi risiko terjadinya tindakan tidak berintegritas dan menjaga transparansi.							
5	**Mengoptimalisasi Sarana Kolaborasi Pembelajaran Guru di Daerah**							

	Instansi pengampu perlu mengoptimalisasi portal pembelajaran kolaboratif bagi tenaga pendidik di daerah untuk dapat saling berbagi materi serta pengalaman dalam rangka menguatkan ekosistem dukungan bagi peserta didik. Portal ini berfungsi untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik terkait bagaimana membangun kepercayaan diri dan keyakinan peserta didik terhadap pentingnya nilai integritas. Portal Rumah Pendidikan dapat dioptimalisasi menjadi kanal manajemen pengetahuan (knowledge management) bagi para tenaga pendidik untuk menguatkan kapasitas serta perannya sebagai pengampu utama yang mendukung penguatan karakter peserta didik. Melalui portal ini juga, instansi pengampu dapat menyiapkan mekanisme apresiasi berbasiskan monitoring dan evaluasi terukur, terhadap pencapaian maupun kisah inspiratif dari para tenaga pendidik dalam mendukung ekosistem integritas terutama bagi para peserta didik mereka. Mekanisme apresiasi ini disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah.							

6	**Mendorong Penguatan Resiliensi Peserta Didik Jenjang Menengah Melalui Praktik Pembelajaran Berbasis Proyek** Instansi pengampu perlu mendorong praktik pembelajaran di satuan pendidikan yang mencakup pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), yang melatih resiliensi peserta didik melalui penyelesaian masalah etis konkret. Untuk menunjang agenda ini, instansi pengampu seyogyanya melatih tenaga pendidik untuk dapat menjadi fasilitator dalam pembelajaran berbasis proyek. Skema implementasi pembelajaran berbasis 4.proyek ini dapat melalui insersi terhadap mata pelajaran yang sudah ada, terutama mata pelajaran terkait pendidikan akhlak, Pancasila, dan kewarganegaraan. Proyek yang diimplementasikan berupa simulasi mengatasi dilema etis, yang dihubungkan dengan situasi nyata para siswa sehari-hari (seperti: dilema antara menyontek dan mendapatkan nilai bagus, dilema antara menjaga pertemanan dan memberikan contekan, dst).							

7	**Membangun Instrumen Penilaian Keteladanan Integritas dan Mengintegrasikannya ke dalam Mekanisme Penilaian dan/atau Sertifikasi terhadap Tenaga Pendidik dan Pimpinan Satuan Pendidikan Jenjang Dasar** Instansi pengampu perlu membangun instrumen tambahan terkait keteladanan integritas dalam mekanisme penilaian dan/atau sertifikasi tenaga pendidik dan pimpinan satuan pendidikan. Kriteria penilaian mencakup transparansi penilaian peserta didik, kehadiran tepat waktu, penolakan praktik nepotisme, serta keterlibatan dalam proyek etika satuan pendidikan. Penilaian dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan peserta didik dan komite satuan pendidikan untuk meningkatkan kepatuhan tenaga pendidik terhadap pakta integritas. Penilaian partisipatif dapat memanfaatkan internet (seperti online form) ataupun secara manual melalui pertemuan langsung (terutama pada daerah dengan keterbatasan akses internet). Tenaga pendidik dan/atau pimpinan satuan pendidikan yang lolos sertifikasi atau							

	mendapatkan penilaian terbaik dapat diberi gelar “Guru Teladan” atau gelar sejenis serta mendapatkan apresiasi tertentu. Mekanisme apresiasi disesuaikan dengan kebutuhan serta mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah. Pemerintah juga dapat mengkampanyekan kisah inspiratif mereka melalui media lokal untuk memperluas dampak keteladanan.							
8	**Menerapkan Kerangka Pelaporan Keuangan Terpadu di Seluruh Satuan Pendidikan** Instansi pengampu perlu menerapkan kerangka pelaporan keuangan terpadu (seperti penggunaan dana BOS, sumbangan, atau bantuan keuangan lainnya) di seluruh satuan pendidikan baik jenjang dasar maupun menengah, agar menyampaikan laporan keuangannya secara transparan. Khusus untuk daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur internet, kerangka pelaporan dapat dibuat secara manual dan dilaporkan berkala melalui media yang dapat diakses publik seperti majalah dinding. Verifikasi dan							

	audit dilakukan serta diawasi secara langsung dan berkala oleh instansi pengampu, dengan sebisa mungkin melibatkan partisipasi masyarakat maupun orang tua/wali peserta didik. Sementara pada daerah yang sudah memiliki infrastruktur digital cukup memadai, skema pelaporan terpadu dapat memanfaatkan portal atau platform digital, dengan memanfaatkan instrumen eksisting, serta dilaporkan secara berkala dan real-time. Instansi pengampu perlu membangun mekanisme apresiasi bagi satuan pendidikan yang secara konsisten menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan. Mekanisme apresiasi yang dibangun dapat berbentuk penyusunan skema pemberian dana insentif, bantuan untuk program prioritas, dan lainnya sesuai dengan kebutuhan serta mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah. Di sisi lain, instansi pengampu juga perlu menyediakan pelatihan pengelolaan keuangan bagi satuan pendidikan dan bendahara, serta memfasilitasi audit independen yang melibatkan akademisi dan perwakilan masyarakat.							

9	**Memperkuat Sistem Manajemen Administrasi Publik pada Sektor Pendidikan** Instansi pengampu perlu melakukan penguatan dalam sistem manajemen administrasi publik di sektor pendidikan, terutama pada hal-hal yang memiliki titik kerawanan korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti pada mekanisme perekrutan peserta didik baru, promosi jabatan tenaga pendidik dan kepala satuan pendidikan, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ). Pada mekanisme perekrutan peserta didik baru, sistem yang eksis saat ini perlu diperkuat guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian pada skema promosi jabatan dan penempatan tenaga pendidik serta kepala satuan pendidikan, perbaikan serta penguatan mesti didasarkan pada kebutuhan riil dengan data yang valid. Sementara pada PBJ, proses di dalamnya perlu memperkuat mekanisme alur dari hulu ke hilir yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun regulasi terkait.							

Dimensi Tata Kelola

Gratifikasi

Persentase satdik dengan kebiasaan orang tua siswa memberikan bingkisan/hadiah kepada guru saat hari raya atau kenaikan kelas	96.3%
Persentase guru terkait persepsi gratifikasi merupakan sesuatu yang wajar	94.55%
Persentase satdik dengan kejadian guru menerima bingkisan dari siswa agar lebih memperhatikan siswa	77.78%
Persentase satdik dengan kejadian penerimaan siswa karena imbalan tertentu	33.33%

Dimensi Ekosistem

Kedisiplinan Tenaga Pendidik

Persentase satdik dengan kejadian guru meninggalkan kelas sebelum pembelajaran berakhir	92.73%
Persentase satdik dengan kejadian guru yang terlambat masuk kelas tanpa alasan yang jelas	54.55%
Persentase satdik dengan kejadian guru tidak hadir mengajar	50.91%

Dimensi Tata Kelola

Pengadaan Barang/Jasa

Persentase satdik dengan praktik pembelian sarana dan prasarana sekolah (ATK, laptop/komputer/lab, dll) dilakukan secara kurang transparan	89.09%
Persentase satdik dengan kejadian penentuan vendor pelaksana/penyedia (toko, kontraktor, perusahaan) berdasarkan relasi pribadi	70.91%
Persentase satdik dengan kejadian menerima komisi dari vendor (toko, kontraktor, perusahaan) tempat membeli sarana/prasarana sekolah	61.11%

Persentase satdik dengan kejadian pembelian sarana dan prasarana sekolah (ATK, laptop/komputer/lab, dll) yang kurang sesuai dengan kebutuhan belajar dan mengajar

42.59%

Dimensi Tata Kelola

Nepotisme

Persentase satdik dengan kejadian siswa menerima perlakuan khusus saat penerimaan

85.19%

Persentase satdik dengan kejadian guru mendapatkan promosi karena kedekatan dengan pimpinan

78.18%

Persentase satdik dengan perlakuan khusus pimpinan kepada guru tertentu

68.52%

Persentase satdik dengan perlakuan khusus kepada siswa

50.91%

Dimensi Tata Kelola

Pengelolaan Keuangan

Persentase satdik dengan kondisi orangtua tidak mudah memperoleh rincian biaya kegiatan sekolah

83.33%

Persentase satdik dengan komite sekolah/pengurus perwakilan orangtua murid meminta dana sumbangan untuk kegiatan yang belum disepakati

57.69%

Persentase sekolah yang menjelaskan secara kurang terbuka terkait biaya, sumbangan atau kegiatan lainnya

51.85%

Persentase sekolah yang memberitahukan secara kurang jelas terkait biaya

48.08%

Dimensi Ekosistem

Kecurangan Akademik Tenaga Pendidik

Persentase satdik dengan kejadian guru melakukan plagiarisme dalam (meniru/menyalin karya) dalam menyusun karya tulis/ilmiah/publikasi seperti Penelitian Tindakan Kelas (PTK)/pengembangan media ajar, modul

81.48%

Persentase satdik dengan kejadian guru yang melakukan kecurangan untuk mendapatkan sertifikasi/kinerja/inpassing	33.33%
Dimensi Ekosistem	
Dukungan Terhadap Perilaku Siswa	
Persentase satdik dengan kejadian guru tidak menegur siswa yang melanggar aturan (misal menyontek, berbohong)	81.48%
Persentase satdik dengan kejadian orang tua yang memaklumi perbuatan tidak baik anak (misal menyontek, berbohong)	73.08%
Persentase satdik dengan kejadian orang tua yang rela melakukan apapun untuk menyelesaikan masalah anak	53.85%
Persentase satdik dengan kejadian orang tua yang tidak mengingatkan anak agar tidak berbuat curang	38.46%
Dimensi Karakter	
Ketekunan Dalam Belajar	
Persentase siswa asyik bermain sampai lupa belajar	80.23%
Persentase siswa tidak mengerjakan tugas yang sulit	8.84%
Persentase siswa tidak mengerjakan tugas kelompok	4.42%
Dimensi Tata Kelola	
Perilaku Koruptif	
Persentase satdik dengan kejadian guru yang menggunakan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadinya	79.63%
Persentase satdik dengan kejadian guru memberikan bimbingan belajar tambahan dengan meminta bayaran/iuran	74.07%
Persentase satdik dengan praktik pungutan yang dikenakan di luar biaya resmi dari sekolah dalam penerimaan siswa baru	

55.77%

Persentase satdik dengan praktik pungutan biaya dalam proses pengajuan sertifikasi, proses penyetaraan jabatan, atau pengajuan dokumen lainnya kepada pihak terkait

50%

Dimensi Karakter

Kejujuran Akademik

Persentase siswa yang menyontek walaupun tahu perbuatan tersebut tidak baik

78.37%

Persentase siswa yang memilih menyontek daripada belajar

44.88%

Persentase siswa yang meminta orang lain mengerjakan tugas

24.65%

Persentase siswa yang tidak berani menolak ajakan menyontek

24.42%

Dimensi Ekosistem

Keteladanan

Persentase satdik dengan kejadian guru yang pernah melakukan kesalahan/berperilaku buruk di depan siswa seperti membuang sampah sembarangan, menyerobot antrian atau berbohong

77.78%

Persentase satdik dengan kejadian guru yang berbicara dan berperilaku kasar kepada siswa

35.19%

Dimensi Karakter

Kejujuran Sehari-hari

Persentase siswa berbohong karena takut orang tua marah

75.58%

Persentase siswa berbohong untuk menyembunyikan kesalahan

71.16%

Persentase siswa menyalahkan teman agar tidak dihukum

	1.63%
Dimensi Tata Kelola	
Penyalahgunaan Dana BOS	
Persentase bentuk penyalahgunaan dana BOS di sekolah berupa nepotisme dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa/proyek	73.33%
Persentase bentuk penyalahgunaan dana BOS di sekolah selain berupa pemerasan, nepotisme, atau penggelembungan biaya	60%
Persentase bentuk penyalahgunaan dana BOS di sekolah berupa penggelembungan biaya penggunaan dana	53.33%
Persentase sekolah yang menerima dana BOS yang mengakui bahwa penggunaan dana BOS di sekolahnya belum sesuai dengan peruntukannya	27.78%
Persentase bentuk penyalahgunaan dana BOS di sekolah berupa pemerasan/potongan/pungutan	26.67%
Dimensi Karakter	
Kedisiplinan Peserta Didik	
Persentase siswa terlambat mengumpulkan tugas	68.84%
Persentase siswa terlambat datang ke sekolah	35.12%
Dimensi Ekosistem	
Akreditasi	
Persentase satdik dengan praktik kecurangan dalam akreditasi	50%